

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama yang dijalankan perbankan syariah, semakin lama perbankan syariah semakin berkembang. Laju pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan tidak pernah lepas dari peran sektor perbankan. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah di Negara-negara muslim berpengaruh terhadap perkembangan perbankan di Indonesia. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan imbalan yang diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun bagi hasil. Berdasarkan Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 tersebut, maka berdirilah bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah semakin pesat sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap berdiri dan mampu bertahan. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sama sekali bantuan dari pemerintah bahkan mampu memperoleh laba

Rp. 300 miliar lebih. Tidak hanya itu, pada saat krisis keuangan global pada tahun 2008, bank syariah kembali membuktikan daya tahannya dari krisis. Bank syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana (Statistik Perbankan Syariah, BI:2011).

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Hasibuan, 2005:100). Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Laba merupakan hal yang penting bagi bank karena di dalam laba tercermin tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank, sebagai tolok ukur tingkat kesehatan bank, tolok ukur baik buruknya manajemen bank, dapat meningkatkan daya saing dan status bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, terdapat delapan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, yaitu return on asset, return on equity, net interest margin, biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan, prospek laba operasional.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Tujuan utama operasional bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal (Lestari dan Widyawati, 2014). ROA penting bagi bank karena dapat digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien. ROA dapat memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan *income*.

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009:118). Dengan kata lain, penggunaan asset bisa dilihat dari cara perusahaan melakukan *good corporate governance* dalam mekanisme *corporate governance*.

Mekanisme *corporate governance* menurut Boediono (2005) adalah suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan. Menurut Beiner *et.al.* (2003) mekanisme *corporate governance* digunakan untuk mengontrol perusahaan yang bertindak bagi kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, sedangkan indikator mekanisme eksternal terdiri dari kepemilikan institusional (*institutional ownership*). Dalam penelitian ini, mekanisme yang akan dikaji terdiri dari ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.

Dewan komisaris (*board of commissioner*) berfungsi untuk melakukan pengawasan. Dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut dan berperan sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG, serta diperlukan komitmen penuh dari dewan komisaris agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan (Effendi, 2016:26). Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh

dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Pembentukan komite audit bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola yang baik (*good corporate governance*) di perusahaan, pembentukan komite audit harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan (SK) dewan komisaris (Effendi, 2016:48). Dalam proses pelaksanaan mekanisme *corporate governance* perusahaan juga harus memperhatikan kondisi perekonomian yang berubah dari waktu ke waktu.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, bank tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Kaitannya dalam hal ini, faktor-faktor ekonomi makro seperti neraca pembayaran, pendapatan nasional meliputi produk domestik bruto dan produk nasional bruto, gross domestik produk, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, nilai tukar valas, jumlah uang beredar dan suku bunga (Sukirno, 2006:26). Dalam penelitian ini digunakan indikator ekonomi makro, seperti inflasi yang ditunjukkan dalam indeks harga konsumen dan suku bunga yang diwakili oleh suku bunga SBI selama 1 bulan. Pemilihan indikator ekonomi makro ini didasarkan atas penelitian terdahulu oleh Rosanna (2007) dan Perdana (2009).

Sebagai lembaga intermediasi, bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya. Apabila suatu negara mengalami inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya konsumsi, sehingga akan mempengaruhi pola *saving* dan pembiayaan pada masyarakat. Perubahan tersebut akan berdampak pada kegiatan operasional bank syariah, jumlah dana dari masyarakat yang dihimpun akan semakin berkurang sehingga nantinya akan mempengaruhi kinerja bank syariah dalam memperoleh pendapatan dan menghasilkan profit (Sukirno, 2006:15). Teori di atas didukung oleh penelitian Hassan dan Bashir (2002) yang melakukan penelitian pada bank syariah. Dalam penelitiannya, Hassan menggunakan 231 sampel bank syariah dari 21 negara untuk periode 1994-2001. Hassan menjelaskan bahwa inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian oleh Vong dan Chan (2008) juga

mengatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum di Macau.

Selain inflasi, variabel lain yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Dalam menentukan tingkat bagi hasil baik dalam pendanaan maupun pembiayaan, bank syariah masih mengacu kepada tingkat suku bunga umum sebagai *equivalent rate* atau masih dijadikan benchmark dalam penentuan margin bagi hasil (*profit sharing*). Meningkatnya suku bunga pada bank konvensional mengakibatkan nasabah akan memindahkan dananya ke bank konvensional. Naiknya suku bunga bank konvensional berakibat langsung terhadap sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK pada bank syariah akibat pemindahan dana tersebut tentunya sangat mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana. Bila hal tersebut terjadi, maka pendapatan dan profit bank akan menurun (Karim, 2002). Hasil penelitian Rosanna (2007) menyatakan bahwa suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2009), mengungkapkan bahwa suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Stiawan (2009) menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA bank syariah di Indonesia. Secara kajian teori maka hasil penelitian pada perbankan Syariah di Indonesia cenderung lebih sesuai dengan Teori Ekonomi Islam murni yang menjelaskan bahwa pada ekonomi Islam lebih mengutamakan perputaran uang pada sektor riil sehingga ada kesesuaian antara *Money supply* dan *money demand*. Dalam Islam tidak mengenal uang sebagai bentuk investasi melainkan hanya sebagai alat tukar, sehingga uang harus diputar untuk usaha riil yang mendatangkan manfaat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2016) menyatakan hal yang sama yaitu inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Alasan yang menjelaskan kondisi tersebut adalah walaupun inflasi yang tinggi mencerminkan kenaikan barang-barang yang mengakibatkan nilai peredaran uang dapat berkurang akibat dari harga yang meningkat, akan tetapi kondisi tersebut tidak mempengaruhi masyarakat dalam berinvestasi dan menyimpan dana di bank syariah.

Selain inflasi, menurut Sodiq (2014) menyatakan bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sudin Haron yang menyimpulkan bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013) menyatakan bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suku bunga bank umum mengalami kenaikan, namun ROA di bank syariah tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adestian (2015) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris juga merupakan unsur penting yang mempengaruhi kinerja keuangan. Kondisi ini terjadi karena dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris, maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasehat dan masukan untuk dewan direksi pun menjadi lebih banyak. Sehingga kinerja dari manajemen menjadi lebih baik dan berimbas pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Namun berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Wehdawati dkk (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bahwa sulit untuk menentukan berapa ukuran dewan komisaris yang optimal, karena banyaknya keanggotaan suatu dewan komisaris juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas dari kegiatan perusahaan.

Selain tingkat suku bunga dan ukuran dewan komisaris, menurut Hariri (2016) menyatakan bahwa komite audit juga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terbukti komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati system pengendalian internal (termasuk audit internal) sehingga dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan kecurangan dalam bentuk *earnings management* dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani (2016) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menandakan bahwa keberadaan komite audit perusahaan tidak terbukti meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian sebelumnya tentang makroekonomi yang diproksi dengan inflasi dan tingkat suku bunga banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA). Sedangkan penelitian tentang mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit banyak juga dilakukan untuk menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas yang diukur melalui ROA. Namun dalam penelitian ini akan berbeda, peneliti tertarik untuk menganalisis **”Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”**.

### **1.2. Perumusan Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah **”Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”**.

### **1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah diuraikan diatas dan agar penelitian ini dapat terarah, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat suku bunga terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh ukuran komite audit terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh inflasi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada periode 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada periode 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada periode 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh ukuran komite audit terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia pada periode 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan profitabilitas pada bank syariah beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian diharapkan bermanfaat terutama bagi para debitur maupun kreditur bank syariah guna mengetahui bagaimana perubahan suatu kondisi, baik internal maupun eksternal perbankan mempengaruhi kinerja bank syariah. Dengan begitu debitur maupun kreditur mempunyai gambaran pada kondisi yang bagaimana suatu perbankan dapat menguntungkan sebagai media investasi maupun penyedia dana.
2. Bagi bank syariah diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan terhadap kebijakan pembiayaan maupun ekspansi asset serta untuk langkah antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan.
3. Bagi akademisi dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan, melalui pendekatan dan cakupan variabel yang digunakan, terutama pengaruh kondisi makro ekonomi dan mekanisme *corporate governance* bank syariah terhadap profitabilitasnya.